**MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
AKUNTABILITAS DANA DESA**

Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, Anam Miftakhul Huda
E-mail: ernaerna410@gmail.com, nurikamauliyah@gmail.com, a6.asix6@yahoo.co.id
**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar
IAIN Jember**

ABSTRACT

Public accountability is the main foundation of the process of good governance. The concept of good governance is used in order to create good, democratic and trustworthy village governance, a government with public accountability means that the government is always willing to account for all activities mandated by the people. In fact there are still many public institutions that have not implemented the concept of good governance in the system of government, especially in the accountability of funds. Village funds are part of village income derived from the APBN. In its use village funds are prioritized for the field of rural development and the field of community empowerment. This study aims to describe the accountability of the Village Fund in 2017 in realizing Good Governance in the Government of the Village of Genengan, Kecamatan Doko, District of Blitar. Data collection was carried out by observation and interviews with the government of the village of Genengan and several community leaders as well as seeing the completeness of the Village Fund management document. Data obtained from the study were analyzed using qualitative methods by comparing data related to Village Fund accountability in realizing good governance. This study uses a descriptive qualitative approach by collecting data obtained from direct observation and interviews. The results of this study indicate that the accountability of village funds in the village of Genengan has met the criteria for realizing good governance. Where the Village Government has implemented the Village Fund Program in accordance with regulations and involves elements of the government, village institutions, and the community also feel from the results of the Village Government Accountability by always being involved in village meetings or musrenbang and as supervisors or monitoring in the implementation of Village Fund activities.

Keywords: *Village Funds, Accountability, Good Governance*

ABSTRAK

Akuntabilitas publik adalah dasar utama dari proses tata kelola yang baik. Konsep tata kelola yang baik digunakan untuk menciptakan baik, demokrasi dan pemerintahan desa yang dapat dipercaya, pemerintah dengan akuntabilitas publik berarti bahwa pemerintah selalu bersedia untuk *account* untuk semua kegiatan yang diamanatkan oleh orang-orang. Sebenarnya masih ada banyak lembaga-lembaga publik yang belum mengimplementasikan konsep tata kelola yang baik dalam sistem pemerintahan, terutama di akuntabilitas dana. Dana desa adalah bagian dari desa pendapatan berasal dari APBN. Dalam penggunaannya dana desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan pedesaan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas dana desa pada 2017 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di pemerintah desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten. Pengumpulan data dilaksanakan dengan pengamatan dan wawancara dengan pemerintah desa Genengan dan beberapa pemimpin masyarakat serta melihat kelengkapan dokumen manajemen dana desa. Data Diperoleh dari studi dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan membandingkan data yang terkait dengan dana desa akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data yang Diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara. Hasil studi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa di desa Genengan telah memenuhi kriteria untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dimana pemerintah desa telah melaksanakan Program dana desa sesuai dengan peraturan dan melibatkan unsur pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat juga merasa dari hasil akuntabilitas pemerintah desa dengan selalu menjadi terlibat dalam Rapat desa atau musrenbang dan sebagai pengawas atau pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa.

Kata kunci: Desa dana, akuntabilitas, kelola

PENDAHULUAN

Pengesahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 membawa berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut undang-undang tersebut, setiap desa mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa. UU Desa ini memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Meskipun nilai sebesar satu miliar tersebut belum dapat terealisasi secara penuh, namun paling tidak pemerintah telah berusaha menepati janji untuk melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke pelosok desa. Dana Desa yang berkisar pada angka ratusan juta rupiah sudah mulai dikururkan pada tahun 2015 ke seluruh desa di Indonesia melalui kabupaten, tanpa dipotong sepeserpun. Meskipun demikian, sejumlah aparat desa belum berani mengambil serta memanfaatkan dana desa yang telah masuk di rekening desa. Belum adanya aturan yang jelas tentang mekanisme pengambilan dan pemakaian Dana Desa menyebabkan mereka merasa khawatir untuk menggunakan dana tersebut. Mengingat APBN 2015 merupakan tahun pertama dialokasikannya dana desa, penting bagi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut. (Kompas, 2015). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari berbagai sumber, antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa yang sah, Dana Desa (DD) yang merupakan Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah (BHPR), Alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan Desa yang sah. Dengan adanya Dana Desa ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen *good governance*. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan.

Perencanaan dan penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis Kemudian dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengatakan bahwa ada 110 kasus dana desa dan alokasi dana sepanjang tahun 2016 sampai 10 Agustus 2017. Dari sekian kasus itu, rata-rata pelaku kasus penyelewengan dana tersebut dilakukan oleh kepala desa. Selain itu ada juga yang dilakukan oleh perangkat desa maupun pihak terkait yang menjalankan dana desa. Dari kasus ini jumlah kerugian Negara mencapai Rp. 30 M. data tersebut diambil berdasarkan berbagai sumber media hingga aparat penegak hukum lainnya. Penyelewengan yang dilakukan antara lain, penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perwujudan *good governance* pada pengelolaan akuntabilitas Dana Desa di Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar.

TINJAUAN TEORETIS

Fadhil Azhar (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk perencanaan Dana Desa sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dilihat dari kelengkapan dokumen serta transparansi informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan juga

dapat dikatakan akuntabel dengan melihat pengalokasian yang sudah sesuai prioritasnya. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan program sesuai rencana. Namun untuk administrasi (pertanggungjawaban dana) masih terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan keterlambatan dana yang turun.

Riska Apriliana (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan ADD secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD. Ni Wayan Rustiarini (2016), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apabila dikaitkan dengan makna dan hakikat pengelolaan sesungguhnya, masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, termasuk dalam tipe Penelitian Kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada Akuntabilitas Dana Desa, khususnya Dana Desa di Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Metode Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara *purposive* (pengambilan sampel secara sengaja) dan *snowball* (teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya

kecil, kemudian membesar), teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini

Pada penelitian yang menjadi informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, TPK, PPHP, dan beberapa tokoh masyarakat. Informan yang dipilih adalah individu yang terlibat langsung, memahami, dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa, yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1.

No	Informan (inisial)	Jabatan dalam Kedinasan
1	KD	Kepala Desa
2	SD	Sekretaris Desa
3	PPHP	PPHP
4	TPK	TPK
5	KT	KARANG TARUNA
6	PKK	PKK
7	RT	KETUA RT
8	TML	TOKOH MASYARAKAT L
9	TMP	TOKOH MASYARAKAT P
10	TA	TOKOH AGAMA

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Akuntabilitas Dana Desa di Desa Genengan Kec. Doko

Akuntabilitas dana desa yang dimaksud adalah sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh UNPD (1997), *good governance* akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang efisien, sektor bisnis yang berhasil, dan organisasi masyarakat yang efektif, apabila mencakup 9 prinsip: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik. Akuntabilitas Dana Desa merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator

good governance tersebut. Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa Akuntabilitas Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan melalui musyawarah desa, berdasarkan penelitian terhadap observasi dan hasil wawancara kepada informan terkait untuk mengaplikasikan konsep-konsep 4 Dimensi Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002), walaupun belum sepenuhnya maksimal, hal ini secara penerapan tercermin dalam beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam suatu organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan praktek KKN. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Termasuk dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalkannya jenis akuntabilitas ini biasanya perlu dilakukan audit kepatuhan oleh pihak yang berkepentingan.

"Kita sudah menjalankan program sesuai undang-undang yang berlaku, sepanjang pemerintah desa berjalan sesuai dengan peraturan tidak ada masalah atau tidak ada yang perlu ditakutkan, jadi siapapun bukan hanya media masa, baik masyarakat, lembaga manapun media yang lain jika ingin melihat program dana desa di pemerintah desa kami siap memberi informasi karena kami berjalan tidak ada yang ditutup-tutupi. Selama hal itu masih dalam kewenangan desa." (KD, 3 Juli 2018)

Petikan percakapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan program sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman penggunaan Dana Desa, serta dalam pembuatan perencanaan pembangunan

desa atau yang disebut RKPDes telah sesuai hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah cara atau prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik atau belum dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya. Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa perlu adanya sebuah Tim dalam pelaksanaannya.

"Waktu itu rapat desa sekitar tahun 2015 an, berdasarkan hasil musyawarah saya ditunjuk oleh Kepala desa sebagai pengawas TPK. Saya ya kaget, tapi ya memang itu sudah aturannya dek, bahwa ketua PPHP harus dari perangkat, jadi ya saya manut pak lurah saja. Kami beranggotakan 3 orang, ketua saya, sekretaris pak slamet dan anggota pak jukiono. Pak jukiono ini orang baru, yang lama orangnya tidak aktif jadi ya diganti. Sampai saat ini pun saya masih menjabat sebagai PPHP, tugas saya ya memonitoring pekerjaan TPK, sudah sampai tahap mana. Tapi sejauh ini tugas TPK alhamdulillah berjalan lancar dan baik, tidak kendala yang begitu fatal". (PPHP, 05 Juli 2018)

Dalam pembentukan sebuah tim Kepala Desa melibatkan unsur perangkat, lembaga dan masyarakat yang terkait, hal ini dilakukan untuk menghindari praktik KKN. Sebelum pembentukan itu dilakukan, kepala desa terlebih dahulu membuat rencana pembangun tahunan atau yang disebut dengan RKPDes, yang diambil dari rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang dibuat setiap 5 tahun sekali, seperti disampaikan dalam petikan hasil wawancara berikut:

"Sebelum pembentukan tim tadi kami sudah membuat perencanaan desa yang tertuang dalam APBDes. APBDes dimulai dari musyawarah dusun yang membahas tentang usulan-usulan masyarakat untuk program tahun depan. Ini dilaksanakan sekitar bulan juli. Lalu hasil dari masing-masing dusun akan dibahas dalam musrenbangdes, lalu hasilnya akan kami buat RKPDes, yang mana Rencana ini disetujui bersama dalam rapat Desa yang

dihadiri oleh unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LPMD, RT, RW, Karang Taruna, PKK dan tokoh masyarakat yang lain. Kemudian tugas tim tadi selanjutnya adalah membuat pengajuan dana untuk prodran mana yang akan mereka kerjakan terlebih dahulu” (KD, 03 Juli 2018)

Berdasarkan cuplikan pendapat diatas bahwa dalam pelaksanaan program Dana Desa di Pemerintah Desa Genengan proses yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Genengan adalah pembentukan tim-tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program-program Dana Desa yang sesuai dengan PERBUP Blitar No. 12 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Dalam pelaksanaan musrenbangdes juga melibatkan lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, hal ini ditegaskan oleh anggota BPD Desa Genengan. Kemudian membuat Rekapitulasi permintaan pembayaran, ditambah lagi proses pengajuan dan pencairan DD dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 113 tentang pengelolaan keuangan desa, dilanjut lagi dalam pembuatan pertanggungjawaban dana (SPJ) yang setiap tahun ada pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Blitar. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Kepala Desa, Ketua TPK, PPHP, Bendahara Desa.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program merupakan akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Dalam penyusunan program Dana Desa tidak lepas dari pihak-pihak terkait yaitu perangkat desa, lembaga desa dan tokoh masyarakat.

“Seperti yang di atur dalam Permendagri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan di desa bahwa desa berkewajiban membuat rencana pembangunan yang pelaksanaannya bulan Juli. Diawali dengan musyawarah

tingkat dusun lalu hasilnya dibawa pada musyawarah tingkat desa atau musrenbangdes dan saya melibatkan unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LPMD, RT / RW, Karang Taruna, PKK dan tokoh masyarakat yang lain.” (KD, 03 Juli 2018)

Berdasarkan pendapat diatas bahwa sesuai dengan Permendagri 113 tentang pengelolaan keuangan di desa, bahwa desa berkewajiban membuat rencana pembangunan desa mulai bulan Juli untuk tahun berikutnya. Bapak Arif selaku kepala desa telah melaksanakan hal tersebut mulai dari musyawarah tingkat dusun, lalu tingkat desa hingga tingkat kecamatan. Beliau melibatkan unsur Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, RT/RW, dan beberapa tokoh masyarakat lalu dalam hal pencairan dana beliau menyampaikan bahwa pencairan sesuai dengan permintaan pembayaran dari TPK. Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan dari ketua TPK. Selanjutnya dalam penggunaan dana pemerintah desa menggunakan DD untuk program pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan permendes no. 22 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2017.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah terlebih kepada masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Program Dana Desa yang sudah dijalankan dan dioptimalkan oleh Pemerintah Desa tentunya membuat masyarakat ingin mengerti seberapa jauh perkembangan program tersebut berjalan, agar masyarakat tahu perlu adanya transparansi.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa sesuai dengan Permendagri 113 tentang pengelolaan keuangan di desa, bahwa desa berkewajiban membuat rencana pembangunan desa mulai bulan Juli untuk tahun berikutnya. Bapak Arif selaku

kepada desa telah melaksanakan hal tersebut mulai dari musyawarah tingkat dusun, lalu tingkat desa hingga tingkat kecamatan. Beliau melibatkan unsur Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, RT/RW, dan beberapa tokoh masyarakat lalu dalam hal pencairan dana beliau menyampaikan bahwa pencairan sesuai dengan permintaan pembayaran dari TPK. Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan dari ketua TPK. Selanjutnya dalam penggunaan dana pemerintah desa menggunakan DD untuk program pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan permendes no. 22 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2017.

5. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah terlebih kepada masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Program Dana Desa yang sudah dijalankan dan dioptimalkan oleh Pemerintah Desa tentunya membuat masyarakat ingin mengerti seberapa jauh perkembangan program tersebut berjalan, agar masyarakat tahu perlu adanya transparansi.

1.2 *Good Governance* di Desa Genengan Kec. Doko

Salah satu makna penting dari *good governance* adalah keterlibatan pelaku-pelaku *governance* diluar Negara dalam merespon masalah-masalah publik. Dalam pelayanan publik keterlibatan masyarakat sipil dan mekanisme pasar sudah banyak terjadi, sehingga praktek *good governance* sebenarnya sudah bukan hal yang baru lagi. Namun menurut Forum Kajian Ambtenaar Provinsi Jawa Timur (Agus Dwiyanto, 2006) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekarang ini adalah rendahnya peran masyarakat dan

stakeholders dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konsep ini, peran warga yang utama hanyalah menggunakan pelayanan publik, yang telah diberikan oleh pemerintah, apapun jenis dan kualitasnya. Mereka tidak memiliki pilihan mengenai jenis pelayanan, kualitas, kuantitas, dan cara memperolehnya karena semuanya telah ditentukan oleh pemerintah.

Pemerintah Desa sudah mencoba untuk mengaplikasikan konsep-konsep *Good Governance* dari pernyataan (UNDP tahun 1997) agar masyarakat bisa merasakan Program Dana Desa yang sudah dijalankan, hal ini secara aplikatif tercermin dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran serta masyarakat dalam suatu lingkungan kegiatan. Peran serta disini menyangkut akan adanya proses antara dua atau lebih pihak yang ikut mempengaruhi satu sama lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana atau kebijakan.

“Kami selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan desa. Nantinya juga akan mereka nikmati sendiri kegiatan yang mereka usulkan, jadi kami hanya memberikan wadah kepada mereka agar mereka ikut berperan aktif dalam pembangunan desa. Terlebih untuk kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, yang notabene untuk mensejahterakan masyarakat desa.” (KD, 03 Juli 2018)

Berdasarkan petikan pendapat diatas bahwa partisipasi di Desa Genengan sudah melibatkan warga mulai dari rapat perencanaan pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program yang dilaksanakan secara swakelola yaitu dikerjakan sendiri oleh masyarakat Desa Genengan. Hal ini didukung oleh pendapat Kepala Desa dan ketua RT yang peneliti wawancarai. Namun ada tokoh masyarakat yang kadang dilibatkan dalam rapat dan kadang tidak.

2. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Rule of law berarti penegakan hukum yang adil serta tanpa pandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum.

"Untuk menaati hukum atau tidaknya saya kurang tau mbak, apalagi masalah DD, tapi semoga saja pemerintah desa genengan berpegang pada aturan yang ada dalam melaksanakan kegiatannya." (RT, 05 Juli 2018)

Berdasarkan pendapat diatas bahwa penegakan hukum untuk kegiatan DD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu permendes no. 22 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2017. Beberapa tokoh masyarakat juga sependapat yang sama tentang penegakan hukum yang adil di Desa Genengan.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap publik tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah, terutama para pengguna pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik, satu hal yang membedakan antara organisasi swasta dan publik adalah dalam masalah transparansi sendiri. Dalam organisasi swasta, keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus. Banyak hal yang dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak. Sementara itu, organisasi sektor publik yang bergerak atas nama publik mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan begini, akan terlihat bagaimana suatu sistem yang berjalan dalam organisasi tersebut.

"saya rasa Pemerintah Desa sudah transparan kepada masyarakat, dengan dilibatkannya kami dalam Rapat Desa atau Musrenbang. Pemerintah Desa menyampaikan perkembangan program yang di danai Dana Desa yang sedang dikerjakan oleh TPK" (RT, 05 Juli 2018)

Berdasarkan pendapat diatas bahwa

transparansi Pemerintah Desa untuk kegiatan DD yang sudah dilaksanakan telah memenuhi keterbukaan yang sesuai dengan kriteria, seperti diungkapkan oleh ketua RT Rt. 01 Rw. 05 bahwa dalam rapat desa selalu melibatkan warga baik saat rapat perencanaan (mesrenbangdes) maupun rapat desa yang lain. Hal itu didukung oleh pendapat dari beberapa tokoh masyarakat yang lain.

4. Cepat tanggap (*Responsiveness*)

Responsif berarti cepat tanggap, pemerintah harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan publik (*public interest*) sehingga cepat berbenah diri. Masyarakat merupakan sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang monoton atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan, masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah dalam memenuhi berbagai kepentingannya.

"Pemerintah desa sudah tanggap mbak, contohnya pembangunan jalan rabat penghubung ngadirejo dengan jatiroto sepanjang 330 meter. Yang jalan itu sangat penting bagi masyarakat sebagai jalan sumber ekonomi mereka." (TA, 03 Juli 2018)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas menyatakan bahwa Pemerintah Desa Genengan telah cepat tanggap dalam menjawab kebutuhan masyarakat terbukti dengan jawaban salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa saat pengusulan rencana pembangunan berpendapat untuk pemasangan lampu di jalan gang desa, dan ternyata oleh Pemerintah Desa kegiatan itu direalisasikan karena merupakan prioritas yang wajib didahulukan. Pendapat itu didukung oleh tokoh masyarakat yang lain.

5. Membangun Konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada konsensus berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan

bersama diantara para pelaku yang terlibat dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik.

“Pemerintah desa sudah membangun consensus, dalam rapat selalu melibatkan kami para lembaga dalam tersebut pengambilan keputusan” (TMP, 09 Juli 2018)

Dari pendapat diatas mengemukakan bahwa dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan telah sesuai dimana pemerintah desa sudah memihak kepada kepentingan masyarakat dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan dilibatkan dalam merumuskan kebijakan secara bersama dalam program DD tahun 2017, hal ini didukung oleh tokoh masyarakat yang lain. Akan tetapi ada tokoh masyarakat yang berbeda pendapat, dia berdalih tidak tahu tentang program apa saja yang dikerjakan di tahun 2018 ini, dikarenakan dia tidak menghadiri undangan yang disampaikan padanya.

6. Keadilan (*Equity*)

Keadilan berarti semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani.

“Saya kira adil mbak, pemerintah desa genengan melihat apa yang harus dibenahi dulu dan dibutuhkan masyarakat, diprioritaskan mana yang lebih membutuhkan. Kan ya dana desa itu terbatas juga, tidak mungkin semua usulan warga akan terlaksana tahun depan. Dan saya pernah dengar kalo dana desa akan ada pemotongan, tidak tahu kenapa.” (RT, 05 Juli 2018)

Berdasarkan pendapat diatas keadilan di Desa Genengan telah mencapai target dimana menurut pendapat tokoh masyarakat menyatakan bahwa sebagian program DD memang dikhususkan untuk kesejahteraan warga kurang mampu dan itu menjadi prioritas

utama Pemeirntah Desa, salh satu contoh dalam pembuatan jamban untuk warga kurang mampu serta pemberian makan tambahan (PMT) untuk balita da lansia saat posyandu rutin setiap bulan. Hal ini didukung dengan pernyataan lain dari tokoh masyarakat yang lain.

7. Efektif dan Efisien (*Effectiveness and Efficiency*)

Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya.

“Pelaksanaan Dana Desa saya rasa sudah mencapai sasaran, dibentuknya Tim Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang sesuai dengan kemampuannya, dan pelaksanaan program-program Dana Desa yang di kerjakan sesuai rencana.” (TMP, 09 Juli 2018)

“saya kira sudah sesuai, tapi kadang ada proyek yang melambat materialnya, tidak tahu kenapa, waktu saya tanya kepada TPK katanya uangnya belum cair lagi.” (TML, 9 Juli 2018)

Berdasarkan pendapat diatas bahwa efektifitas dan efisiensi untuk pelaksanaan DD di Desa Genengan sudah mencapai sasaran dengan dibentuknya TPK yang melaksanakan program sesuai dengan rencana awal. Selain itu didukung dengan laporan penggunaan DD yang telah dibuat oleh bendahara desa. Hal ini disampaikan oleh satu tokoh masyarakat dan didukung dengan pendapat yang lain.

8. Bertanggungjawab (*Accountability*)

Bertanggungjawab berarti berani untuk mempertanggungjawabkan dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam pemberian pelayanan publik, akuntabilitas dapat dinilai dari sudah efektifkah prosedur yang diterapkan oleh organisasi tersebut, sudah

sesuaikah pengaplikasiannya, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain.

“Pemerintah desa sudah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Dana Desa yang dijalankan, dilihat dalam setiap proses pekerjaan selalu dikerjakan dengan tepat waktu dan sesuai sasaran, kita selalu dilibatkan dan diberi informasi melalui rapat desa yang diikuti oleh unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat” (TMP, 09 Juli 2018)

Berdasarkan pendapat diatas pertanggungjawaban DD di Pemerintah Desa Genengan sudah dilaksanakan dengan tercapainya sasaran program-program DD selain itu juga didukung dengan disampaikannya informasi tersebut melalui rapat-rapat desa. Serta pembuatan suat pertanggungjawaban (SPJ) DD.

9. Visi Strategik (*Strategic Vision*)

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan, Pemerintah dan Masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat.

”Ya tentunya dalam Program Dana Desa masyarakat pasti mempunyai Visi kedepan, dan tentunya Visi masyarakat tidak luput dari adanya kerjasama dengan Pemerintah Desa. Maka itu Pemerintah Desa selalu melibatkan kami sebagai masyarakat dalam sebuah Rapat desa atau Musrenbang, ditambah dengan adanya program pelatihan penanaman durian yang tujuannya untuk menjadikan desa genengan menjadi kampung wisata durian, hal ini sudah ditindaklanjuti dengan pemberian 1 bibit pohon durian untuk setiap rumah di desa genengan. Nantinya hasil dari tanaman ini bisa diambil sendiri oleh warga yang menanamnya.” (TMP, 09 Juli 2018)

Berdasarkan petikan wawancara diatas bahwa visi strategik untuk DD kedepan telah direncanakan oleh Pemerintah

Desa Genengan, terlihat pada beberapa program yang dilaksanakan yaitu pelatihan penanaman durian serta pemberian bibit tanaman durian kepada masyarakat, kedepan Pemerintah Desa Genengan berharap kegiatan itu bisa menjadikan Desa Genengan menjadi desa wisata kampung durian. Selain itu beberapa pemberdayaan masyarakat yang lain seperti pelatihan untuk masyarakat terutama ibu-ibu melalui kegiatan PKK Desa. Hal ini diuraikan oleh tokoh masyarakat dan saling mendukung antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Dengan kata lain visi kedepan masyarakat dan Pemerintah Desa Genengan adalah menjadikan Desa Genengan menjadi lebih baik dari tahun ketahun agar Desa Genengan bisa bersaing dengan desa yang lain, hingga mensejahterakan masyarakatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Genengan Kec. Doko Kab. Blitar berdasarkan empat dimensi akuntabilitas (Mardiasmo, 2002), bahwa:

1. Kepatuhan terhadap hukum dan kejujuran terhadap pelaksanaan DD telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Genengan hal ini sejalan dengan pendapat dari para tokoh, serta terbukti sesuai dengan peraturan yang mereka gunakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Permendes No. 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2017, serta Permendagri 113 tentang pengelolaan keuangan di desa.
2. Dalam pelaksanaan proses Dana Desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dalam proses perencanaan harus terbentuk TPK desa dan Desa Genengan sudah melaksanakan hal itu sesuai dengan PERBUP no. 12 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Selanjutnya dalam proses pengajuan dan pencairan DD sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Desa Genengan

- sudah melaksanakannya sesuai Permendagri 114 tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Pelaksanaan akuntabilitas program ini sudah dilaksanakan Pemerintah Desa Genengan dimana dalam rapat selalu melibatkan unsur Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW dan tokoh masyarakat yang lain. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat lain yang tidak diundang, tetapi sudah ada yang mewakili tiap RT. Program-programnya pun sudah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh peraturan yaitu Permendes No. 22 Tahun 2-16 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2017, dimana di Desa Genengan digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat.
 4. Pertanggungjawaban atas transparansi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Genengan sudah dilakukan dengan menyampaikan pada rapat desa, selain itu didukung dengan pembuatan banner untuk APBDes Awal tahun dan pembuatan baner APBDes di akhir tahun anggaran, yang ditaruh di papan pengumuman desa serta di depan kantor desa. Selain itu pembuatan laporan penggunaan DD setiap bulan yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
 5. Dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan hasil pembahasan yang diterapkan oleh pemerintah desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Genengan telah menerapkan konsep-konsep 9 poin *good governance* dari UNDP.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fadhil Azhar. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa studi kasus di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una-una* [skripsi]. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Fadhil Azhar. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa studi kasus di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una-una* [skripsi]. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Muksin. 10 Januari 2015. *Mengawal Dana Desa*. *Kompas*. Halaman 7.
- Ni Wayan Rustiarini. 2016. *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa studi kasus di Provinsi Bali. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung. 18 (2): 1-18.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 12 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa
- Riska Apriliana. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance* [skripsi]. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Surakarta
- Schiavo C, Salvatore, Daniel Tommasi. 1999. Managing Government Expenditure. Manila: Asian Development Bank.*
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa
- UNDP. 1997. *Governance for Sustainable Development- A Policy Document*.
- Yulida. 2018 Agt 11. *Indonesia Corruption Watch* Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa. *Detikcom*. Rubrik Opini: 6 (kol 1-6)